

TAJUK RENCANA

Sanksi Gembok Parkir Sembarangan

“DITERAPKAN di Gunungkidul, Parkir Sembarangan Dikenai Sanksi Gembok”. Demikian judul berita yang dilansir koran ini, Kamis (14/7) kemarin. Inti berita tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul memberlakukan penggeblokan bagi kendaraan bermotor yang melakukan parkir sembarangan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polres setempat.

Bagi pelanggar, dapat dikenakan sanksi penggeblokan, kemudian sanksi tilang dan denda hingga Rp 500.000. Prosedur melepas gembok, pemilik kendaraan datang ke Satlantas Polres Gunungkidul untuk kemudian diberikan surat tilang. Surat tersebut ditunjukkan ke Dishub, setelah itu baru dilakukan pelepasan gembok. Tentu saja aturan ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak melanggar. Kalau kedapatan ada yang melanggar tentu saja harus maklum kalau dikenai sanksi ini.

Kebijakan ini kiranya cukup bagus untuk diterapkan. Bukan dimaksudkan untuk menyulitkan masyarakat, atau untuk mengumpulkan rupiah dari denda tilang, melainkan untuk kelancaran mobilitas masyarakat dalam berlalulintas. Kalau arus lalulintas lancar, maka kegiatan masyarakat juga akan bisa berjalan dengan lancar. Tetapi kalau harus melewati jalan yang macet, kegiatan masyarakat-pun akan menjadi terganggu. Bahkan kalau macetnya lama suatu kegiatan bisa kacau. Lebih dari itu mereka yang terjebak kemacetan akan kehilangan banyak hal, baik kehilangan waktu maupun BBM bagi kendaraannya yang hilang secara mubazir.

Karena itu memang sudah semestinya masyarakat tidak memarkir kendaraannya secara

sembarangan, asal-asalan, dan mengganggu arus lalulintas. Untuk itulah parkir harus diatur, khususnya di sepanjang jalan yang rawan kemacetan. Pasti ada tempat-tempat untuk parkir, dan ada juga tempat-tempat yang dilarang untuk parkir. Termasuk posisi parkir kendaraan di tempat parkir juga perlu diatur, sehingga memudahkan ketika memasukkan atau mengeluarkan kendaraan, di samping tidak mengganggu arus lalulintas.

Kebijakan semacam ini sebenarnya juga perlu dilakukan di daerah lain. Di setiap kabupaten/kota pasti ada ruas-ruas jalan yang rawan kemacetan. Di situlah aturan parkir mesti dibuat dan harus ditegakkan. Mengenai sanksi bagi pelanggar apakah dengan cara digembok atau langsung diangkut kendaraannya, atau dengan cara lain, itu hanyalah teknis mengatasinya. Yang pasti, harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain agar tidak meniru.

Edukasi kepada masyarakat memang harus terus dilakukan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal memarkir kendaraan pada tempatnya. Hal ini bisa saja karena masyarakat kadang lalai, atau kadang sengaja melanggar kalau tidak ada petugas, misalnya hanya akan parkir sebentar. Karena itu pengawasan terhadap pene-gakan aturan juga perlu dilakukan.

Harapannya, dalam jangka panjang masyarakat kita akan terbiasa dengan perilaku tertib dan disiplin dalam menjalankan semua aturan. Kalau sudah tercipta kebiasaan semacam ini, Insya Allah semua hal akan bisa berjalan dengan lancar. Meski untuk itu masih perlu perjuangan panjang. □

TERDAPAT

suatu pengertian yang cukup spesifik terkait sikap atau tindakan radikal, yakni apa yang biasa disebut sebagai *tidak ngapa-ngapain*. *Tidak ngapa-ngapain*, di sini bukan berarti tidak melakukan aktifitas rutin harian. Tetapi lebih dalam pengertian melakukan tindakan atau aktifitas tidak dalam rangka memenuhi hasrat dan ideologi manusia tertentu.

Kalau *toh* nanti tetap disebut sebagai hasrat, tidak lain aktifitas hasrat meleburkan diri bersama hukum dan kehendak alam semesta. Suatu aktifitas berkesadaran penuh dalam *kefana-an*. Aktifitas dalam berbagai kegiatan yang seolah tidak menghasilkan apa-apa. Kondisi itu kadang disalahmengerti sebagai sikap pasif karena tidak ada inisiatif dalam dirinya. *Tidak ngapa-ngapain* bukan berarti *nganggur*, duduk-duduk manis.

Tidak Bekerja

Bagaimana halnya dengan para pekerja fisik? Yang harus melakukan aktifitas seperti tukang, buruh pabrik, melakukan aktifitas jual beli di pasar, para petani dan nelayan yang harus bekerja dan *ngapa-ngapain*?. Karena jika tidak bekerja dan *ngapa-ngapain*, ora obah, maka, katanya, nanti tidak punya uang untuk membeli makan.

Melakukan aktifitas bekerja mencari makan, itu suatu aktifitas yang selaras dengan hukum dan tuntutan alam. Jika kemudian nafkah yang didapat memang diniatkan untuk bertahan secara alami-ah agar tubuh tidak kelaparan atau tidak sakit. Berbeda dengan bekerja keras karena ingin kaya, ingin sukses, ingin terlihat hebat, ingin dipuji karena melakukan tindakan yang keren. Hal ini yang bertentangan sehingga harus dan sangat perlu justru dilawan dengan sikap *tidak perlu ngapa-ngapain*.

Dalam pernyataan yang sedikit kontradiktif, tidak perlu menolong orang jika

Aprinus Salam

pamrihnya. ingin mendapat balasan dan dipuji. Tidak perlu bersedekah jika niatnya ingin mendapat predikat dermawan. Tidak perlu bekerja jika motifnya ingin kaya.

Apakah kemudian tindakan yang secara normatif dianggap baik itu tidak



KR-JOKO SANTOSO

boleh atau tidak perlu?. Tentu boleh. Akan tetapi, jika kita melakukan itu, karena tuntutan sesuatu di luar diri kita, ada satu tatanan yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dan bertindak.

Tatatan itu misalnya saja orang harus *ngapa-ngapain* dengan maksud orang lain akan suka dan senang dengan kita. Implikasinya, kita perlu *nyogok* agar orang lain senang dan orang itu akan melakukan sikap sebaliknya.

Mekanisme itu membuat banyak orang terlibat dalam satu sistem saling bergantung. Banyak orang kemudian menjadi percaya bahwa nasib kita ditentukan oleh mekanisme saling bergantung tersebut. *Ngapa-ngapain* adalah *pamrih*

Demokrasi, Kemakmuran dan Keadilan

INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) DIY mengalami kenaikan peringkat cukup signifikan di tahun 2021. Kenaikan tersebut ditopang bagusnya aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), DIY menduduki peringkat 3, di atas Jawa Tengah. Namun masih di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur yang menduduki peringkat 1 dan 2.

Mari kita refleksikan, demokrasi dapat dilihat dengan dua cara. Pertama, demokrasi dilihat sebagai tujuan. Demokrasi dalam pandangan ini dianggap memiliki kebaikan pada dirinya sendiri. Karena itu, terlepas dari hal-hal lain, demokrasi layak diperjuangkan, diwujudkan, dan diperbaiki. Pandangan kedua, demokrasi dilihat sebagai alat belaka sementara ada tujuan lain yang dianggap lebih penting; yakni, kesejahteraan dan keadilan. Pandangan ini menganggap bahwa kemakmuran dan keadilan jauh lebih berharga ketimbang demokrasi itu sendiri.

Kinerja Demokrasi

Jika dibandingkan dengan nasional, pada aspek kesetaraan, IDI DIY skornya sebesar 87,29, adapun nasional rerata skor pada aspek tersebut sebesar 78,86. Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, skor DIY sebesar 80,74, sedangkan nasional skornya sebesar 75,67. Sedangkan aspek kebebasan, DIY tertinggal, yakni skornya sebesar 74,31, adapun skor rerata nasional pada aspek tersebut sebesar 79,72 (BPS, 2022).

Dari perbandingan terhadap rerata nasional tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada aspek kesetaraan dan lembaga demokrasi, situasi demokrasi di DIY lebih baik dibanding rerata nasional. Namun, untuk aspek kebebasan, DIY memiliki pekerjaan rumah dan harus berbenah karena skornya tertinggal cukup signifikan dari rerata na-

M Taufiq AR

sional.

Sebagaimana diutarakan di awal, demokrasi bisa dilihat atau diperlakukan dengan dua cara. Pertama, demokrasi diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri; dan yang kedua, demokrasi dilihat sebagai tujuan antara untuk meraih tujuan yang dianggap lebih baik lagi.

Dalam kenyataan sehari-hari, sejumlah warga memilih untuk menukar demokrasi dengan kemakmuran. Marak beredarnya stiker *iPiye kabare: Isih enak jamanku, ta?i* yang bergambar Soeharto dan yang mewakili gejala ini. Kemakmuran ekonomi, bagi sebagian orang, jauh lebih penting ketimbang

Kesejahteraan

Studi Przeworski dkk (2000) menunjukkan, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) serta distribusi ekonomi (keadilan) tidak menunjukkan hubungan yang sistematis. Artinya, ada insiden dimana pencapaian demokrasi dibarengi pula dengan insiden kemakmuran dan keadilan. Namun pada saat yang sama, ada pula insiden demokrasi yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kemakmuran dan keadilan. Contoh negara-negara Asia Timur dan sejumlah negara Amerika Latin sering dikutip sebagai ilustrasi. Sebaliknya, Amartya Sen menunjukkan bahwa demokrasi cenderung membawa kemakmuran. Hubungan antara demokrasi, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan keadilan di DIY menunjukkan relasi yang asimetris. Demokrasi yang ditunjukkan dengan skor indeks demokrasi yang tinggi, tata kelola pemerintahan yang direflek-

sikan dengan capaian opini WTP 11 kali berturut-turut. Serta nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan predikat AA (tinggi diantara Pemda se-Indonesia) selama 3 tahun berturut-turut). Ternyata tidak simetris dengan tingginya angka kemiskinan serta tingginya ketimpangan kesejahteraan antar penduduk di DIY.

Akhirnya, penyandingan itu memberikan kita dua spekulasi menarik : pertama, peringkat demokrasi terpisah dari peringkat kesejahteraan. Kedua, peringkat demokrasi tidak terpaut dengan peringkat keadilan. Apa yang hendak disampaikan di sini bukanlah bahwa perbaikan peringkat demokrasi tidak perlu dilakukan. Namun menjadi PR bagi kita semua bagaimana kualitas penghayatan demokrasi dapat lebih substantif, yakni menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga, tanpa kecuali. □

*) **M Taufiq AR SIP MPA**, perencana di BAPPEDA DIY, Pengurus ICMI DIY)

Pojok KR

Hari ini mulai pemulangan haji.
-- Semoga lancar dan mabrur semua.

Pemda DIY dukung program Tapera bagi PNS.
-- Kalau sudah punya rumah, kerja jadi tenang.

Warganet agar bijak di dunia maya.
-- Jangan asal ‘share’ apa saja.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** : KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga .

Semarang: :Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: :Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: :Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang: :Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo: :Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: :Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP